

Pengarusutamaan Gender: Studi Kasus Jurnalis Perempuan Metro TV

Ballian Siregar, Veranus Sidharta, Wenny Maya Arlena

ballian@esaunggul.ac.id

veranussid@gmail.com

wenny.maya@budiluhur.ac.id

Universitas Esa Unggul, Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas Budi Luhur

ABSTRAK

Dewasa ini ada banyak perempuan ingin memposisikan dirinya diterima dunia apa pun jenis tugas, profesi serta pekerjaannya. Faktor kemanfaatan dari kesetaraan menyebabkan perempuan tidak menyadari sesungguhnya telah dikuasi atau mengalami pengucilan. Perempuan menjadi bagian agen perubahan dunia dari segala sektor profesi. Tetapi secara patriarki kedudukannya selalu dikesampingkan dalam proses pembangunan sebuah daerah maupun negara. Doktrin perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki menyebabkan terganggunya kesetaraan dan keadilan yang ditandai diskriminasi. Metro TV sebagai tempat bekerja subjek penelitian ini, yakni Jurnalis Perempuan Metro TV, menyadari doktrin yang sudah melembaga tersebut. Itulah sebabnya Metro TV berupaya memposisikan pengarusutamaan gender di lingkungannya. Perempuan dan laki-laki mendapat kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk liputan. Namun, liputan daerah konflik harus melalui pertimbangan matang tentang siapa yang diterjunkan, jurnalis perempuan atau jurnalis laki-laki. Dalam situasi seperti ini Metro TV lebih mengutamakan jurnalis laki-laki karena pertimbangan risiko besar meski tidak menutup kemungkinan dilakukan pria. Penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena profesi jurnalis perempuan dari aspek kebijakan, implementasi dan partisipasi jurnalis perempuan dalam melakukan liputan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data empiris (studi kasus, wawancara, pengamatan pribadi, dan pengalaman pribadi) yang menggambarkan kondisi dan situasi, serta makna dalam kehidupan secara individual dan kelompok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jurnalis perempuan dinilai lebih sensitif, teliti, rajin, cekatan, empati, sabar dan tidak cepat menyerah, setia, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Selain itu, jurnalis perempuan dinilai lebih dalam ketika menganalisis masalah-masalah sosial. Kesimpulannya, Metro TV dalam pengarusutamaan gender memberikan kesempatan yang sama kepada jurnalisnya, baik laki-laki maupun perempuan, dalam peliputan ke lapangan. Kendati demikian, tidak menghilangkan kodrati sebagai perempuan seperti melahirkan, haid maupun menyusui. Jurnalis perempuan diberi kesempatan cuti sesuai aturan atau diberikan kebijakan khusus "cuti" haid maupun menyusui.

kata kunci; gender, metro tv, jurnalis perempuan, pengarusutamaan

Pendahuluan

Latar Belakang

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG (Pengarusutamaan Gender) dan beragam Perundang-undangan tentang perempuan serta komitmen terhadap kesepakatan internasional telah mendorong terjadinya Perubahan Paradigma pemberdayaan perempuan, yaitu dari WID (women in development) ke GAD (Gender and Development) (Hubeis, Aida, 2016). Guna mencapai dan mewujudkan pemberdayaan agar tercapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia, perlu dilakukan strategi rasional dan sistematis.

Dewasa ini ada banyak perempuan ingin memposisikan dirinya diterima dunia apa pun jenis tugas, profesi serta pekerjaannya. Kadang faktor kemanfaatan dari kesetaraan itu, menyebabkan perempuan tidak menyadari sesungguhnya telah dikuasi atau mengalami pengucilan terhadap kaum Hawa. Perempuan menjadi bagian agen perubahan dunia dari segala sektor profesinya. Tetapi secara patriarki kedudukannya selalu dikesampingkan dalam proses pembangunan sebuah daerah maupun negara.

Kesetaraan dan keadilan gender sejatinya ditandai tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Mengutip Sumar (2015), merujuk sejarah bahwa dominasi laki-laki telah terjadi di semua lapisan masyarakat di sepanjang zaman. Kaum perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Inilah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang berlangsung sejak lama.

Gender menjadi isu dunia yang tidak akan habis sampai zaman kapan pun karena posisi perempuan ingin mendapatkan pengakuan yang sama di mata laki-laki. Dalam kondisi lingkungan sosial posisi perempuan dalam rumah masih ditempatkan hanya sebagai kepala manajer rumah tangga, namun posisi kepala keluarga tetap berada di tangan kaum laki-laki. Bagaimana dengan profesi lainnya di luar sana?

Salah satu pengarusutamaan gender dalam artikel ini adalah menyoroti pemberdayaan profesi jurnalis dengan gender perempuan di mata masyarakat. Profesi jurnalis sejak zaman perang sangat melekat pada kaum laki-laki di mana cara kerja jurnalis membutuhkan kemampuan fisik, berpikir logika, cepat dan kuat dalam menghadapi situasi kondisi apa pun. Karena itu, hanya laki-laki yang mampu melakukan tugas-tugas jurnalis, bukan kaum perempuan. Begitu kira-kira doktrin yang menyebabkan ketidaksetaraan posisi laki-laki dan perempuan di dunia jurnalis.

Sunarto (2009) menjelaskan media massa adalah produk yang hadir sebagai institusi sosial pembentuk realitas sosial, serta ekspresi identitas yang dihayati bersama secara komunal. Media dengan dunia jurnalis dapat dikatakan sebagai wilayah yang paling terlihat memposisikan perempuan dieksplorasi sehingga citra kaum perempuan menjadi bermacam-macam. Keterlibatan jurnalis perempuan menjadi bagian berpolitik dalam pembangunan bangsa.

Roehanna Koeddoes yang dikutip dari Wikipedia misalnya adalah seorang jurnalis perempuan yang mempunyai komitmen kuat pada pendidikan terutama untuk kaum perempuan. Roehana termasuk satu dari sedikit perempuan yang percaya adanya diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kesempatan mendapat Pendidikan, dan tindakan semena-semena semacam itu harus dilawan. Mengandalkan kecerdasan, keberanian, pengorbanan serta kegigihannya dalam berjuang, Roehana melawan ketidakadilan guna mengubah nasib kaumnya.

Keahliannya dalam pintar berbahasa dimanfaatkan untuk berkontribusi membuat tulisan di surat kabar hingga menjadi redaktur di satu radio. Sosoknya menjadi pionir bagi kaum perempuan yang ikut dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dengan profesi sebagai jurnalis perempuan.

Salah satu asosiasi yang menjadi advokasi jurnalis perempuan bernama AJI (Asosiasi Jurnalis independen) memberikan ruang yang luas bagi kaum perempuan untuk bisa menjadi jurnalis, di samping organisasi wartawan lainnya seperti PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia).

Untuk melihat kesetaraan gender dalam ruang berita politik, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI, Forum Wartawan Wanita Indonesia) antara Februari dan Maret 2019 melakukan survei terhadap 105 jurnalis perempuan dari delapan provinsi (Sumatera Utara, Sumatra Barat, Aceh, Riau, Jambi, Papua, Papua Barat, dan Jawa Barat). FJPI mencoba memetakan bagaimana media memperlakukan jurnalis perempuan, serta posisi perempuan dalam manajemen ketika menangani masalah menyangkut perempuan.

Sebagian besar responden atau lebih dari 93 persen mengatakan pria dan perempuan memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan penugasan secara umum. Mayoritas (77) atau sekitar 73 persen mengatakan bahwa mereka telah memiliki pengalaman dalam meliput politik. Selain itu, sekitar 40 persen mengatakan mereka melakukan tugas politik bersama rekan-rekan lelaki, satu situasi yang kadang-kadang bisa menjadi kontroversial di Indonesia, yang menjadi semakin konservatif dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini juga terjadi pada jurnalis perempuan di media masa elektronik atau televisi, salah satunya adalah jurnalis perempuan Metro TV yang bertugas melakukan liputan di lapangan, baik dalam kondisi di daerah konflik maupun di daerah non-konflik

Dalam proses pembangunan pada profesi sebagai jurnalis perempuan, penulis ingin melihat apakah kebijakan, peran, posisi dan strategi serta tantangan jurnalis perempuan memiliki arah yang jelas dalam kontribusinya.

Media dalam berbagai retorika mengusung independensinya di berbagai sektor terkait tugas dan fungsinya sebagai media massa, yang ternyata tidak lepas dari semangat menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama. Dominasi kaum Adam ini memberi implikasi redaksional yang disengaja atau tidak. Profesi jurnalis harus memiliki kekuatan riset dan kemampuan analisis yang hanya berada di kaum laki-laki, sehingga stereotype tersebut harus diubah

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran gender dalam profesi jurnalis perempuan di stasiun televisi Metro TV?
2. Bagaimana strategi kebijakan pembedayaan perempuan berprofesi sebagai jurnalis perempuan di stasiun televisi Metro TV?

Tujuan Penelitian

Penulis ingin melihat fenomena profesi jurnalis perempuan dilihat dari aspek kebijakan, implementasi dan partisipasi jurnalis perempuan dalam melakukan liputan di lapangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data bersifat empiris (studi kasus, wawancara, pengamatan pribadi, dan pengalaman pribadi) yang menggambarkan kondisi dan situasi, serta makna dalam kehidupan secara individual dan kelompok.

Studi ini berupaya memperoleh informasi kualitatif dengan pendeskripsian yang teliti, lengkap dan akurat. Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara partisipatif tentang peristiwa mendalam lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan untuk mengungkapkan atau memahami sesuatu hal.

Landasan Teori

Gender

Gender merupakan produk konstruksi sosial budaya terkait dengan peran, kedudukan dan kebutuhan, baik laki-laki maupun perempuan (fakih : 1996). Bagi masyarakat isu gender merupakan isu baru sehingga tafsir dan respons tentang gender menjadi tidak proposional.

Oakley (1972) mengartikan gender sebagai perbedaan atau jenis kelamin non-biologis serta bukan kodrat Tuhan. Caplan (1987) melihat dari segi perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Selain struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses social dan cultural. Dalam ilmu sosial gender dimaknai sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan ciri sosial masing-masing (Zainuddin, 2006: 1).

Konsep Gender mengacu pada peran dan tanggung jawab, baik sebagai perempuan maupun laki-laki yang dibentuk atau diinternalisasi dalam keluarga, masyarakat, budaya masyarakat di mana kita hidup, termasuk harapan, sikap, sifat, perilaku, bagaimana sejatinya menjadi laki-laki atau menjadi perempuan (culturally learned and assigned behavior).

Konsep gender sejatinya tidak melulu soal hak perempuan, namun bagaimana bisa mendorong seluruh komponen masyarakat agar berkontribusi besar dalam memainkan perannya dalam hubungan sosial dan personal. Konsep gender kemudian membentuk strategi Pengarusutamaan Gender yang ditandai dengan perubahan paradigma pemberdayaan perempuan.

Perubahan paradigma perempuan dari sebelumnya WID (Women in Development) ke GAD (Gender and Development) sebagai reaksi terhadap WID yang melancarkan program dan

kegiatan pembangunan hanya untuk perempuan, sedang GAD berupaya memahami subordinasi perempuan melalui analisis relasi gender (Hubeis, Aida V, 2016).

Hubeis, Aida V (2016) mengutip Bravo-Baumann (2000) menjelaskan, relasi gender adalah cara-cara di mana suatu budaya atau masyarakat mendefinisikan hak-hak, tanggung jawab, dan identitas lelaki dan perempuan dalam relasi komunikasinya. Kesadaran keadilan dan kesetaraan gender membentuk strategi PUG guna memastikan semua lapisan masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, termasuk kaum perempuan. Diharapkan, pembangunan tersebut dapat dilaksanakan serta bermanfaat bagi semua.

Hubeis juga mengutip definisi gender menurut Hilary M. Lips. Gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectations for women and men). Sedangkan Linda L. Lindsey menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (What a given society defines as masculine or feminine is a component of gender).

Nasaruddin Umar (2010) mengutip H. T. Wilson yang menyebut gender sebagai suatu dasar penentu perbedaan laki-laki dan perempuan dalam kebudayaan dan kehidupan kolektif yang berakibat mereka sebagai laki-laki dan perempuan. Sedangkan Elaine Showalter mendefinisikan gender sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial-budaya.

Perspektif Berbeda

Mengapa PUG itu penting. Hal ini terjawab dari Standpoint Theory sebagaimana Hubeis, Aida V (2016) mengutip Harding (1986) dan Wood (2007) yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perspektif terpisah serta perbedaan hierarki sosial mempengaruhi apa yang mereka dilihat dan yang dikomunikasikan karena perempuan dan minoritas lainnya mempersepsi dunia secara berbeda dari kelompok dominan; laki-laki.

Perspektif seperti itulah yang kiranya bisa menempatkan peran dan tanggung jawab sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki sehingga adanya kesadaran tentang keadilan dan kesetaraan gender. Namun, hal itu bukan perkara mudah. Masyarakat Indonesia menganut patriarki, di mana sistem monopoli atau dominasi pengambilan keputusan di setiap level pemerintahan dan kekuasaan.

Hubeis, Aida V (2016) menjelaskan, keyakinan patriarki didasarkan pada interpretasi patriarki dari sexism yang menggugat pembagian hak yang tidak setara antargender bersifat alami, tidak perlu diubah atau sangat sulit diubah (lihat, Wolfie, 1980). Selanjutnya, pencitraan peran gender atas dasar teropong sexism dicirikan oleh manfaat pembangunan yang lebih diposisikan dan dikontrol oleh mereka yang mendominasi publik, yaitu kaum laki-laki.

Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender merupakan strategi dipakai guna mengurangi kesenjangan laki-laki dan perempuan Indonesia, baik mengakses maupun mendapatkan manfaat dari pembangunan, serta partisipasi untuk ikut serta mengontrol proses pembangunan.

Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan kesamaan hak, baik sebagai laki-laki dan perempuan maupun sebagai manusia untuk dan berperan dan berpartisipasi di semua aspek kehidupan; kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, Pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta memiliki kesempatan yang sama menikmati hasil pembangunan.

Karakteristik gerakan perempuan global sangat kompleks dan belum memiliki tujuan jelas dan sama dalam mengusung prioritas agenda kesetaraan (antrobis : 2004). Kesetaraan gender menurut Hubeis (2016), ditandai tidak ada diskriminasi terhadap perempuan maupun laki-laki. Mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol pembangunan serta

memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Perjuangkan kemerdekaan, pendidikan, mensejahterakan bangsa sampai mensukseskan Pemilu dan Pilukada.

Indikator kesetaraan gender dapat diukur berdasarkan poin berikut:

Akses

Aspek akses merupakan peluang atau kesempatan untuk memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Keadilan dan kesetaraan dalam memperoleh akses sumber daya yang dibuat bagi perempuan dan laki-laki maupun anak perempuan dan laki-laki. Sebagai contoh bagi jurnalis perempuan adalah akses memperoleh kebebasan dalam mendapatkan sumber atau peristiwa apa pun.

Partisipasi

Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan peliputan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini jurnalis perempuan dan laki-laki apakah memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan dalam redaksional.

Kontrol

Kontrol merupakan kemampuan menjalankan wewenang atau kekuatan dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah stasiun televisi sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak.

Manfaat

Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan pimpinan redaksi dalam tugas liputan apakah memberi manfaat adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak. Sistem ekonomi patriarki dan politik internasional yang mensubordinasikan peran dan posisi perempuan, juga mendorong timbulnya gerakan perempuan untuk menuntut kesetaraan hak (lasminah 2010).

Keadilan Gender

Keadilan gender merupakan proses dan perlakuan adil, baik kepada perempuan atau laki-laki. Keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, sub-ordinasi, marginalisasi dan kekerasan bagi perempuan atau laki-laki. Dalam masyarakat patriarki, seperti Indonesia, kontrol patriarki merupakan monopoli atau dominasi pengambilan keputusan di semua level pemerintahan dan kekuasaan (hubeis, aida : 2016)

Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Implementasi dalam praktik di sektor jurnalis perempuan, pemerintah dan asosiasi harus memberikan kebijakan yang mampu dilakukan secara tepat agar tercapainya suatu pembangunan maksimal yang diturunkan sebagai berikut:

INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. "Komponen kunci keberhasilan pengarusutamaan gender ditentukan ada tidaknya komitmen politik dan kerangka kebijakan pemerintah guna mendukung pembangunan yang memiliki perspektif gender, sumber daya manusia yang mampu melakukan gender analysis skill, sumber dana memadai, data maupun statistik gender, alat, sistem monitoring, evaluasi, media, maupun peran serta masyarakat".

Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah. "Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah".

Pembahasan

Bagaimana peran gender dalam profesi jurnalis perempuan di stasiun televisi Metro TV?

Jurnalis perempuan di dalam stasiun televisi memiliki peran yang sama dengan jurnalis laki-laki dalam melakukan liputan di lapangan, tidak ada perbedaan pengaturan jam kerja dan jenis liputan bagi jurnalis laki-laki dan perempuan di stasiun TV swasta Metro TV. Hal itu diungkapkan Fadzhila, jurnalis perempuan Metro TV. Sejauh ini belum ada aturan apa pun untuk jurnalis perempuan, semua disamaratakan antara jurnalis laki-laki dan perempuan. Mereka tidak hanya ditugaskan untuk meliput sama dengan kaum laki-laki, tetapi juga harus mampu melakukannya dengan baik dan berkualitas.

Hal ini juga diungkapkan Human Resources Development (HRD) Metro TV Safriyadi. Menurut dia, kebijakan kerja baik jurnalis perempuan atau laki-laki sudah diatur sesuai kebutuhan. Kalau pun harus menghendaki masuk shift malam atau patroli malam hari, tugas itu harus dilaksanakan. Tidak ada perbedaan atau aturan yang mengatur itu, fungsi jurnalis perempuan dan laki-laki diatur sama, baik fungsi maupun tugasnya.

Dari penjelasan di atas aspek akses adanya kesempatan yang sama antara jurnalis perempuan dan laki-laki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, menunjukkan adanya kesetaraan gender antara jurnalis perempuan dan laki-laki.

Dalam hal aspek partisipasi di mana peran jurnalis perempuan, sangat membantu dalam membuat keputusan redaksional, karena cara pandang perempuan lebih detail sehingga memberikan ruang bagi kaum perempuan lainnya. Fenomena jumlah jurnalis perempuan lebih banyak dari jurnalis laki-laki di Metro TV, menurut Safriyadi, dikarenakan proses seleksi yang pada akhirnya menghasilkan lolos tidaknya calon jurnalis.

Tidak ada aturan persentasi jurnalis perempuan dan jurnalis laki-laki. Kebetulan perempuan lebih banyak yang mendaftar atau melamar untuk bekerja di Metro TV. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan perempuan dalam menulis atau bekerja di televisi lebih besar minatnya.

Menurut Fadzhila, keinginan perempuan menulis atau bekerja di televisi di antaranya karena jurnalis perempuan lebih mudah membangun komunikasi dengan narasumber. Fadzhila juga mengatakan bahwa jurnalis perempuan lebih sensitif, teliti, rajin, cekatan, empati, sabar dan tidak cepat menyerah, setia, dan bertanggung jawab. Bagi Fadzhila, jurnalis perempuan lebih cocok untuk berita mendalam, termasuk yang melibatkan politik.

Karena posisi dan peran jurnalis perempuan dikontrol dalam penempatan posisi, maka ada kebijakan-kebijakan khusus bagi jurnalis perempuan apabila sedang hamil, haid, dan menyusui. Seperti diungkapkan Safriyadi, untuk kehamilan memasuki bulan ke-4 biasanya sudah ditarik dari lapangan untuk bertugas di dalam studio menjadi asisten produser, atau produser, kecuali kondisi tertentu sebelum bulan ke-4 sudah ditarik ke dalam studio.

Dalam kondisi haid diberikan izin sakit ke user (redaksi) untuk satu sampai dua hari tergantung kebutuhan saja. Bagi yang sedang menyusui disediakan ruang untuk pompa asinya. Kondisi seperti ini ada aturan tertulis tentang hak dan kewajiban pekerja di Metro TV. Hal serupa juga disampaikan Fadzhila, yakni apabila sedang hamil ditarik ke dalam untuk menjadi asisten produser atau koordinator liputan. Tetapi, tergantung keinginan jurnalis perempuan yang menjalaninya. Kalau dianggap sanggup akan tetap terjun ke lapangan, tetapi ada juga dalam rentang waktu tertentu dia akan ada di dalam studio/kantor. Ketika anaknya sudah mulai besar 1-2 tahun, dia bisa ke lapangan lagi.

Kebijakan yang dilakukan HRD Metro TV telah sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja Indonesia sebenarnya mengizinkan pekerja perempuan "cuti haid" maksimal dua hari setiap bulan. Sedangkan cuti bersalin diberikan tiga bulan, yang dibagi menjadi masing-masing enam minggu sebelum dan sesudah melahirkan. Perempuan menyusui juga diberikan waktu selama jam kerja untuk dapat melakukannya atau setidaknya memompa ASI ke dalam wadah.

Penulis menyimpulkan dalam aspek kontrol tersebut bahwa kodrat sebagai wanita tetap menjadi hal utama sehingga tetap menjadi pertimbangan dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis perempuan, khususnya di daerah berisiko.

Dalam hal aspek manfaat di mana jurnalis perempuan memiliki posisi dan peran berbeda untuk ditugaskan oleh pihak stasiun TV dalam hal peliputan tentang berita perang atau liputan di daerah konflik. Liputan semacam ini lebih diprioritaskan kepada jurnalis laki-laki, tapi perempuan diberikan ruang kontrol ketika peliputan bencana sehingga memberikan makna pengistimewaan keberadaan perempuan.

HRD Metro TV Safriyadi mengatakan, menugaskan jurnalis laki-laki di daerah konflik sudah melalui banyak pertimbangan, tetapi konsekuensi sebagai jurnalis televisi berita harus siap dikirim ke daerah konflik, termasuk perempuan. Hal ini pernah dilakukan kepada jurnalis perempuan Metro TV, Meuthya Hafid. Hal serupa juga disampaikan Fadzhila. Kalau liputan di daerah konflik dilihat lebih dulu potensi bahaya dan pertimbangan lain sehingga penugasan jurnalis laki-laki lebih diutamakan, tetapi kalau untuk wilayah Indonesia, misalnya aksi demo atau bentrok, jurnalis laki-laki dan perempuan peluang penugasan sama.

Merujuk pada penjelasan di atas terlihat adanya aspek keadilan gender: di mana posisi dan peran jurnalis perempuan sangat berarti, seperti yang dikatakan Fadhliza bahwa jurnalis perempuan senang melakukan tugas jurnalisnya dan merasa nyaman meliput isu-isu politik. Mereka juga mengatakan dapat membagi perspektif mereka sebagai perempuan dengan orang lain dalam politik karena pekerjaan mereka, dan mengangkat masalah-masalah perempuan dan anak-anak yang mungkin diabaikan dalam lingkungan politik yang didominasi laki-laki.

Menurut Meuthya, siapa pun yang ingin meliput di daerah konflik harus sudah memiliki keterampilan dan pengalaman yang tangguh di samping insting pelaporan yang kuat. "Saya berharap ada lebih banyak lagi wanita meliput di daerah konflik, karena di sana sebenarnya banyak cerita humanis dari suatu peristiwa konflik yang mungkin luput dari perspektif reporter pria. Terlebih lagi tuduhan menyakitkan bahwa pecundang terbesar dalam konflik adalah perempuan".

Bagaimana strategi kebijakan pembedayaan perempuan yang berprofesi sebagai jurnalis perempuan di stasiun televisi Metro TV?

Melihat aspek akses ruang dan kesempatan yang sama untuk bergabung di sebuah asosiasi sebagai advokasi kaum perempuan demi tercapainya proses pembangunan nasional. Merujuk pada aspek partisipasi dengan cara diikutkan masuk ke dalam anggota asosiasi merupakan strategi untuk melindungi hak wartawan perempuan.

Aspek kontrol dapat dilakukan dengan cara jurnalis perempuan diatur berdasarkan jam bekerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai kodratnya. Hal ini juga dapat ditinjau dari aspek manfaat di mana cara ketika mendapatkan peliputan di daerah konflik dan bencana wartawan perempuan memiliki rasa empati kepada para kaum perempuan dan anak-anak.

Maka dari aspek Keadilan gender dapat dilakukan dengan cara membuat pemberitaan mengenai perjuangan kaum perempuan agar citra perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Melalui pemberitaan kesetaraan gender yang diperjuangkan bisa terwujud dalam semua aspek kehidupan.

Kesimpulan

Kendati kesetaraan gender sudah terwujud dengan baik di lingkungan kerja Metro TV, khususnya ruang redaksi, namun posisi perempuan tetap mendapat keistimewaan dalam peliputan berisiko. Misalnya, bila di daerah konflik, jurnalis laki-laki lebih diutamakan meski tidak menutup kemungkinan juga dilakukan perempuan. Jurnalis Metro TV Meuthya Hafid yang kini menjadi anggota DPR, telah membuktikan itu ketika meliput konflik di Timur Tengah. Tetapi, untuk liputan bencana alam maupun aksi demonstrasi, justru kaum Hawa lebih diprioritaskan.

Peliputan kegiatan politik lebih banyak dilakukan kaum perempuan karena jurnalis perempuan dinilai lebih sensitif, teliti, rajin, cekatan, empati, sabar dan tidak cepat menyerah, setia, dan bertanggung jawab. Itulah alasan mengapa jurnalis perempuan lebih cocok untuk berita-berita yang sifatnya mendalam, termasuk liputan kegiatan politik, tanpa mengabaikan kodratnya sebagai perempuan. Misalnya cuti bersalin maupun kebijakan khusus saat haid dan menyusui.

Saran

Kebaruan penelitian ini sesuai pengalaman Metro TV, khususnya dari ruang redaksi, perempuan dinilai lebih sensitif, teliti, rajin, cekatan dan empati, serta dan tak mudah menyerah dalam meliput kegiatan politik jika dibanding jurnalis laki-laki. Namun, penilaian itu masih perlu didalami lagi, khususnya bagi peneliti yang konsen pada kajian gender. Namun, hal ini menjadi rekomendasi bagi pekerja media untuk mempekerjakan perempuan dalam liputan-liputan politik.

Daftar Pustaka

- Antrobus, P. 2004. *The Global Women's Movement: Definitions and Local Origins*. Dalam antrobus (ed), *the global women's movement: Origins, Issue and Strategy*, 2004, London & new york : Zed books.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hubeis, Aida V. 2016. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. IPB Press.
- Lasminah, U. 2010. *Patriarki Dunia Mengerus Indonesia* posted on May 5, 2010 by wartafeminis
- Sumar, Warni T. 2015. *Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan*. MUSAWA, Vol.7 No.1 Juni 2015 : 158-182
- Sunarto. 2009. *Televisi , Kekerasan dan Perempuan*. Kompas Media Nusantara. Jakarta